



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADANG

# PEMILU 2009 DAN KRISIS PARTISIPASI

*Makalah ini disampaikan pada Seminar Sehari Menyoal Kualitas Pemilu 2009,  
KIPP Sumabar pada 19 Januari 2009*

**Oleh**

**Eka Vidya Putra**

TITLE	PEMILU 2009 DAN KRISIS PARTISIPASI
DATE	21-12-2010
NUMBER	Hd
LENSI	k1
INVENTORY	433 (Hd) 12010-p1 (1)
CLASSIFICATION	324.959 & put p1

**JURUSAN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2010**

# PEMILU 2009 DAN KRISIS PARTISIPASI<sup>1</sup>

Oleh : Eka Vidya Putra<sup>2</sup>

Meskipun masyarakat kita telah terbiasa mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu), dan para penyelenggarapun telah berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu, namun bukan berarti tantangan Pemilu 2009 akan jauh lebih ringan. Kondisinya nanti bisa jadi sebaliknya, Pemilu 2009 akan jauh lebih berat dibandingkan Pemilu-pemilu sebelumnya. Prediksi ini bisa jadi tidak berlebihan, apalagi jika kita mau melihat realitas sosial politik masyarakat sampai dipenghujung tahun 2008 ini.

Realitas politiknya, sejak Pemilu legislatif tahun 2004 sampai dipenghujung tahun 2008 kondisi politik lokal tidak pernah sepi dari hiruk-pikuk Pemilu. Sepanjang tahun 2005 ada 14 kali Pilkada, dengan komposisi satu di tingkat propinsi (gubernur dan wakil gubernur), dua di kota (walikota dan wakil walikota) dan sebelas kali di tingkat kabupaten (bupati dan wakil bupati). Tahun 2006 dan 2007, ada masing-masingnya ada satu Pilkada. Satu di tingkat kabupaten dan satu di tingkat kota. Tahun 2008 jumlahnya kembali meningkat, tercatat ada empat Pilkada dan semuanya diselenggarakan pada daerah perkotaan, termasuk Kota Padang sebagai penutup. Tidak hanya itu, suhu politik 2008 diperpanas lagi dengan mulai menghitung mundurnya sejumlah partai politik dan calon DPD dalam rangka menghadapi Pemilu 2009.

Kondisi tersebut akan berkulindan dengan terus menguatnya tuntutan masyarakat untuk segera menuntaskan krisis ekonomi yang dirasakan semakin memberatkan dan tak berkesudahan. Lebih dari sepuluh tahun hiruk-pikuk politik ditingkahi dengan jerit tangis kemiskinan. Mobilitas vertikal ke atas sepertinya hanya milik masyarakat politik, sedangkan bagi masyarakat biasa harapan itu masih jauh pangang dari pada api.

## Tantangan Pemilu

Menyikapi kondisi tersebut, maka tantangan pelaksanaan Pemilu 2009 sepertinya jauh lebih berat. Beberapa diantaranya adalah; *Pertama*, dari segi penyelenggara. (1) Masalah sosialisasi masih menjadi sorotan banyak kalangan. Walaupun KPU sendiri merasa sudah melakukan sesuatu yang optimal, tapi setiap penyelenggaraan Pemilu masalah sosialisasi selalu menjadi sorotan. Banyak faktor yang menyebabkan lemahnya sosialisasi pada masyarakat, diantaranya berkaitan dengan kondisi keruangan. Luasnya wilayah – apa lagi untuk daerah kabupaten – akan berdampak pada daya jelajah penyelenggara atau peserta Pemilu dalam melakukan sosialisasi. Kondisi serupa akan

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Sehari Menyoal Kualitas Pemilu 2009. KIPP Sumbar, 19 Januari 2009

<sup>2</sup> Dosen Sosiologi Politik, FIS UNP Padang

tergambar juga dari komposisi masyarakat yang heterogen. Keheterogenan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Ketiga-tiganya kategori di atas berdampak langsung pada kecepatan dan kepekaan pemilih dalam mengakses sumber-sumber informasi. Sedangkan informasi merupakan kunci utama dari efektifitas sebuah sosialisasi. Hal lain yang perlu dikritisi dari proses sosialisasi yang dilakukan selama ini adalah media dan cara yang digunakan dalam melakukan sosialisasi yang masih miskin dengan inovasi. Sosialisasi masih mengadakan media berbentuk spanduk, stiker, atau iklan-iklan lewat media masa; (2) Masalah selanjutnya adalah banyaknya masyarakat yang tidak daftar sebagai pemilih. Meski data kependudukan maupun atau data pemilih setiap tahun dilakukan pembaharuan namun masalah data pemilih masih menjadi titik lemah dari penyelenggaraan Pemilu. Terakhir kondisi serupa dapat dilihat dalam Pilkada Kota Padang. Tak jarang kelemahan dari akurasi pendataan pemilih ini menjadi ruang bagi kandidat atau partai yang kalah untuk menggugat hasil akhir dari Pemilu. Jika kondisi tersebut terus berlanjut tidak akan menguntungkan bagi pelembagaan demokratisasi; (3) Masih rentannya hubungan antara KPU dengan sekretariat. Pada tingkat internal, konflik antara anggota KPU dengan staf kesekretariatan KPU menjadi gejala umum yang kerap terjadi. Secara langsung maupun tidak langsung konflik internal di KPU akan mengganggu kinerja penyelenggaraan Pemilu; (4) Kulit dari penyelenggara Pemilu itu sendiri. Berdasarkan catatan, komposisi anggota KPU kabupaten dan kota jika dibandingkan antara yang lama dengan yang baru, jumlah anggota yang baru lebih banyak dibandingkan dengan yang lama. Kondisi tersebut berbeda dengan anggota KPU Sumatera Barat rata-rata anggotanya merupakan wajah lama. Dominasi wajah baru dalam komposisi KPU kabupaten dan kota dapat dilihat sebagai kekuatan dan sekaligus kelemahan.

*Kedua*, tingkat partisipasi politik masyarakat. Angka rata-rata kehadiran pemilih dalam Pilkada mencapai 27%. Namun jika buka perderah kita akan temukan ada sejumlah wilayah yang angka keterlibatan pemilihnya mendekati 50%. Di Sumatera Barat contohnya dalam Pilkada di Kota Bukittinggi dan Kota Padang yang pengguna hak pilih hanya 52% dan 57%. Itu belum kita masukan pemilih yang tidak terdata. Secara nasional, hampir diseluruh penyelenggaraan Pilkada suara yang tidak menggunakan hak pilih masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemenang Pilkada itu sendiri. Banyak alasan yang dapat diperkirakan kenapa tingkat partisipasi masyarakat terus mengalami penurunan. Diantara kemungkinan adalah; (1) Rendah dan tidak efektifnya sosialisasi, pendidikan politik dan komunikasi politik pada masyarakat. Masyarakat kita belum berhasil menjelaskan dengan baik kenapa harus ikut berpartisipasi dalam Pemilu?, apa makna satu suara menentukan perjalanan bangsa?, apa hubungan antara Pemilu dengan aktivitas keseharian yang mereka jalani?, dan seterusnya. Kondisi semakin diperburuk dengan fakta bahwa masyarakat

432 (Hd/2010-p.11)  
324 958  
Pu+  
p.1

lebih dominan hanya diberikan pendidikan pemilih tapi sangat minim mendapatkan tentang pendidikan politik. Disini dapat dilihat bahwa orientasi partai politik atau institusi lainnya hanya "berniat" untuk membangun kesadaran atau lebih radikal lagi untuk memobilisasi orang untuk memilih. Artinya, Pemilu kehilangan makna substantifnya. Kondisi ini kemudian melahirkan sikap apatis atau masa bodoh dari masyarakat. (2) Frustrasi politik, frustrasi politik biasanya muncul dari kelompok-kelompok pemilih rasional. Perguruan Tinggi merupakan kelompok masyarakat yang cukup besar tidak menggunakan hak pilih. Kelompok ini belakangan terus meluas. Gejala tersebut meluas dengan munculnya sikap politik masyarakat semakin tidak percaya pada partai politik, pada Pemilu atau Pilkada. Walau sikap politik tersebut belum terrealisasi dalam perilaku pemilih. Mereka beranggapan bahwa politik merupakan aktivitas kotor yang penuh dengan tipu muslihat, suka menanam tebu dibibir, suka baladang dipunggung orang. Sikap seperti ini dapat disebut dengan sikap sinis.

*Ketiga*, Pesta demokrasi kita masih rentan dengan konflik horizontal, dan vertikal. Konflik dapat terjadi di awal, tengah atau akhir penyelenggaraan proses Pemilu. Realitas politik kita masih sangat jauh dari sikap kedewasaan. Sikap "siap kalah, dan siap menang" baru sebatas komitmen di atas kertas. Kondisi ini disebabkan oleh banyak hal, setidaknya ada dua kondisi yang paling berpengaruh yaitu masalah rekayasa politik dari elite, masalah keotentikan. Pandangan para elit (disemua ranah kehidupan) masih menilai masyarakat kita sebagai kelompok tradisional. Ironisnya, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan jangka pendek, yang seharusnya mesti bertanggungjawab untuk melakukan pencerdasan politik.

Akhirnya, jika tidak hati-hati menyikapi situasi yang berkembang maka kita semua harus bersiap-siap untuk mendengar lonceng kematian bagi proses demokrasi yang sedang berjalan.

-eka-

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIV. NEGERI PADAN